

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI ACEH

KEJAKSAAN NEGERI LANGSA

Jl. T. Chik Ditunong No. 4 Kel. Gampong Jawa Kec. Langsa Kota, Kota Langsa Telp/Fax 0641-21095

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LANGSA

NOMOR: KEP-46B/L.1.13/Cr.3/03/2024

TENTANG

TIM PELAKSANA EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI LANGSA

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LANGSA

Menimbang : a.

- Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tiga Sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi pemerintah yang bersih, dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik;
- b. bahwa Untuk mengakselerasi pencapaian hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu secara konkret dilaksanakan program Reformasi Birokrasi melalui upaya pembangunan Zona Integritas (ZI) satuan kerja Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu diterbitkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Langsa tentang Tim Pelaksana Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Langsa Tahun 2024.

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 - 2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;





- 3 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang pedoman Fakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 6. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-004/A/JA/03/2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kejakaan Republik Indonesia Tahun 2015 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 516);
- 7. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-06/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LANGSA TENTANG TIM PELAKSANA EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI LANGSA TAHUN 2024.

KESATU

Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Tim Pelaksana Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Langsa Tahun 2024.





KEDUA Nama-nama yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada

diktum PERTAMA melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:

1. Melakukan verifikasi dan penilaian terhadap Self asessment dan bukti dukung dari satuan kerja Kejaksaan Negeri Langsa;

2. Hasil Self asessment Kejaksaan Negeri Langsa disampaikan kepada Tim Evaluasi AKIP Tingkat Kejaksaan Tinggi Aceh;

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk

diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

: Keputusan ini mulai berlaku sejak **KEEMPAT** ditetapkan, dengan

ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Langsa 22 Maret 2024 pada tanggal KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LANGSA,



EFRIANTO, S.H., M.H. JAKSA UTAMA PRATAMA NIP. 19711127 199703 1 002

Tembusan:

- Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia;
- Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia;
- Yth. Jaksa Agung Muda Pembinaan; 3.
- Yth. Jaksa Agung Muda Pengawasan; 4.
- 5. Yth. Kepala Biro Perencanaan;
- 6. Yth. Kepala kejaksaan Tinggi Aceh;7. Arsip





LAMPIRAN

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri

Langsa

: KEP-46B/L.1.13/Cr.3/03/2024 Nomor

: 22 Maret 2024 Tanggal

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	Efrianto, S.H., M.H.	Ketua
	Jaksa Utama Pratama (IV/b)	
	Nip. 19711127 199703 1 002	
	Kepala Kejaksaan Negeri Langsa	
2	Zulfan, S.Ag., S.H.	Sekretaris
	Sena Wira (III/d)	
	Nip. 19690619 199403 1 002	
	Kepala Sub Bagian Pembinaan	
3	Carles Aprianto, S.H., M.H.	Anggota
	Jaksa Madya (IV/a)	
	Nip. 19810429 200812 1 001	
	Kepala Seksi Intelijen	
4	Edwardo, S.H., M.H.	Anggota
	Jaksa Madya (IV/a)	
	Nip. 19741116 199703 1 001	
	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	
5	Muhammad Rhazi, S.H., M.H.	Anggota
	Jaksa Madya (IV/a)	
	Nip. 19840312 200812 1 001	
	Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	
6	Feryando, S.H., M.H.	Anggota
	Jaksa Madya (IV/a)	
	Nip. 19841118 200703 1 001	
7	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	A
7	Rieski Fernanda, S.H.	Anggota
	Jaksa Muda (III/d) Nip. 19860620 200912 1 001	
	*	
	Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan	
8	Aidil Fazri Baday, S.H.	Anggota
O	Muda Wira (III/b)	Anggota
	Nip. 19860607 201012 1 002	
	Fungsional Pranata Keuangan APBN	
	i ungsional i lanata Keuangan Ai biv	

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LANGSA,



Efrianto, S.H., M.H.Jaksa Utama Pratama Nip. 19711127 199703 1 002



